



Implementasi Kebijakan Program Sekolah Rakyat Kementerian Sosial RI (Studi Kasus: Sekolah Rakyat Menengah Atas 10 Jakarta Selatan)

Kautsar Ibnu Muharam^{1*} 
Teguh Kurniawan¹ 

¹ Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Indonesia, Indonesia

* Korespondensi: kautsar.ibnu@ui.ac.id ; Tel: (62) +813-3437-6933

Diterima: 31 Oktober 2025; Disetujui: 27 November 2025; Diterbitkan: 12 Desember 2025

Abstrak: Kemiskinan dan pendidikan masih menjadi permasalahan utama di dunia, terutama di Indonesia, pemerintah telah mendorong kebijakan program pendidikan gratis berbasis asrama melalui program “Sekolah Rakyat” yang dituangkan dalam Instruksi Presiden No. 8 Tahun 2025. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi program Sekolah Rakyat di SRMA 10 Jakarta Selatan dengan metode studi kualitatif dengan menggunakan wawancara mendalam, pengamatan, dan studi dokumen sebagai metode pengumpulan data. Kerangka teori implementasi menggunakan George Edward III yang mencakup empat dimensi utama: komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh dimensi implementasi berjalan dengan baik, khususnya pada dimensi komunikasi dan disposisi pelaksana, sedangkan dimensi sumber daya dan struktur birokrasi masih terdapat tantangan dan hambatan dalam implementasinya. Lebih lanjut studi tentang Sekolah Rakyat masih sangat jarang ditemukan, karena Sekolah Rakyat baru dilaksanakan pada bulan Juli 2025. Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk merumuskan rekomendasi bagi pengambil kebijakan dan pelaksana kebijakan agar program Sekolah Rakyat dapat diimplementasikan dengan baik sejalan dengan tujuan utama program.

Kata kunci: Implementasi kebijakan, Sekolah Rakyat, Pendidikan, Kemiskinan, Kesejahteraan sosial

Abstract: Poverty and education remain major global issues, particularly in Indonesia. The government has promoted a free, boarding-based education policy through the “Sekolah Rakyat” program, as stipulated in Presidential Instruction No. 8 of 2025. This study aims to analyze the implementation of the Sekolah Rakyat program at SRMA 10 South Jakarta using a qualitative research method, with in-depth interviews, observation, and document analysis as data collection methods. The theoretical framework for implementation refers to George Edward III, which includes four key dimensions: communication, resources, implementer disposition, and bureaucratic structure. The results of the study show that all implementation dimensions function well, particularly in terms of communication and implementer disposition. However, the resource and bureaucratic structure dimensions still face challenges and obstacles in implementation. Furthermore, studies on Sekolah Rakyat remain very limited, as the program was only launched in July 2025. These insights inform recommendations for policymakers and program implementers to ensure the Sekolah Rakyat program is implemented effectively in line with its main objectives.

Keywords: Policy implementation, Sekolah rakyat, Education, Poverty, Social welfare

1. Pendahuluan

Kemiskinan hingga saat ini masih menjadi tantangan global yang kompleks dan multidimensi. Menurut laporan World Bank bertajuk *Poverty, Prosperity, and Planet Report 2024*, sekitar 700 juta penduduk dunia atau 8,5% populasi global masih hidup dalam kemiskinan ekstrem, dengan pendapatan di bawah 2,16 dolar AS per hari. Laporan tersebut juga memproyeksikan bahwa pada tahun 2030, sekitar 3,5 miliar orang atau 40% populasi dunia kemungkinan akan hidup dengan pendapatan di bawah 6,85 dolar AS per hari (World Bank, 2024). Fakta ini menunjukkan bahwa kemiskinan tetap menjadi isu sentral pembangunan global. Dalam konteks global, United Nations

melalui *Sustainable Development Goals* (SDGs) menempatkan “Tanpa Kemiskinan” (*No Poverty*) sebagai tujuan pertama dalam agenda pembangunan berkelanjutan (SDGs, 2015). Indonesia juga tidak terlepas dari permasalahan kemiskinan, pada tahun 2025 jumlah penduduk miskin di Indonesia tercatat 23,85 juta jiwa dengan persentase kemiskinan sekitar 8,47% dari total populasi, terlebih pada wilayah perdesaan (BPS, 2025).

Salah satu faktor utama dalam upaya pengentasan kemiskinan adalah peningkatan kualitas dan akses pendidikan. SDGs secara eksplisit menempatkan pendidikan berkualitas (*Quality Education*) sebagai tujuan keempat yang saling berkaitan erat dengan tujuan pengentasan kemiskinan. Menurut (Ainscow, 2020) faktor sosial ekonomi termasuk kemiskinan memunculkan pendidikan inklusif sebagai alternatif kebijakan. Pendidikan inklusif adalah instrumen penting dalam mewujudkan hak pendidikan yang adil dan merata, khususnya dalam sistem yang masih terfragmentasi secara struktural dan budaya (Jannah et al., 2021). Di Amerika Latin, intervensi pemberian dukungan finansial pada masyarakat miskin efektif menghasilkan peningkatan partisipasi pendidikan dan memutus rantai kemiskinan keluarga miskin (Fiszbein & Schady, 2009). Sejalan dengan temuan sebelumnya, (Faisal et al., 2020) menemukan bahwa pendidikan nonformal berperan penting dalam menurunkan tingkat kemiskinan di wilayah pedesaan. (Cremin & Nakabugo, 2012) mengkritisi hubungan antara pendidikan, pembangunan, dan kemiskinan dari perspektif kebijakan, sedangkan (Hofmarcher, 2021) menunjukkan bahwa peningkatan akses pendidikan secara signifikan menurunkan risiko kemiskinan di negara-negara Eropa.

Indonesia juga menghadapi dua persoalan klasik tersebut secara bersamaan, yakni kemiskinan dan pendidikan. Tabel 1 menunjukkan bahwa masih tingginya gap yang terjadi antara tingkat Angka Partisipasi Murni (APM) dengan Angka Partisipasi Kasar (APK) di Indonesia. Angka Partisipasi Murni (APM) sendiri merupakan persentase anak yang bersekolah sesuai dengan usia ideal pada jenjang tertentu (SD = 7-12 tahun, SMP = 13- 15 tahun, dan SMA = 16=18 tahun), sedangkan Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan persentase seluruh anak yang bersekolah pada jenjang tertentu, tanpa memperhitungkan usianya (lebih tua dari usia ideal) (Hikma et al., 2020). Berdasarkan Tabel 1, terlihat bahwa proporsi APK jauh lebih besar ketimbang proporsi APM, terlebih lagi pada jenjang SMA dengan tingkat APK sebanyak 87,29 dan tingkat APM hanya 64,32 (BPS, 2024b) (BPS, 2024a). Kondisi ini memperlihatkan bahwa keluarga miskin ekstrem menghadapi beban biaya pendidikan, keterbatasan akses, serta kerentanan sosial yang menyebabkan anak-anak mereka tertinggal dari jalur pendidikan formal.

Tabel 1. Proporsi APM dan APK

Tahun	Jenjang Pendidikan					
	Sekolah Dasar		Sekolah Menengah Pertama		Sekolah Menengah Atas	
	APM	APK	APM	APK	APM	APK
2022	97,88	106,27	80,89	92,11	61,97	85,49
2023	97,89	105,62	81,35	92,51	62,53	86,34
2024	97,94	104,82	81,73	92,21	64,32	87,29

Sumber: BPS, 2024

Selain permasalahan ekonomi, pendidikan di Indonesia juga dihadapkan pada tantangan lain, seperti ketimpangan kualitas antara wilayah perkotaan dan perdesaan, keterbatasan tenaga pendidik, keterbatasan sarana dan prasarana, serta persoalan pembiayaan dan tata kelola pendidikan di era digital. Untuk merespons berbagai persoalan tersebut, Kementerian Sosial meluncurkan program Sekolah Rakyat sebagai inovasi kebijakan pendidikan inklusif bagi masyarakat miskin ekstrem. Program ini bertujuan menyediakan pendidikan berkualitas tanpa biaya melalui sistem pendidikan berasrama (*boarding school*). Selain menekankan aspek akademik, program ini juga berfokus pada penguatan karakter, disiplin, dan pemenuhan gizi peserta didik (Rosa, 2025). Sekolah Rakyat secara strategis dirancang untuk menutup celah akses pendidikan bagi keluarga miskin ekstrem, memastikan

anak usia sekolah dapat kembali masuk ke jalur pendidikan yang sesuai, serta mengurangi angka putus sekolah yang disebabkan oleh hambatan ekonomi. Program Sekolah Rakyat memiliki visi untuk mencetak agen perubahan dalam setiap keluarga miskin melalui intervensi pendidikan yang berkualitas guna memutus transmisi kemiskinan antargenerasi. Misi program ini mencakup: (1) memberikan pendidikan berkualitas untuk mempersiapkan peserta didik melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi; (2) menanamkan semangat pantang menyerah; (3) menumbuhkan jiwa kepemimpinan dan nasionalisme; serta (4) membentuk karakter berakhlak dan berbudi pekerti luhur (Kementerian Sosial, 2025). Program ini dirancang tidak hanya sebagai sarana pendidikan formal, tetapi juga sebagai wadah pembentukan karakter dan pemberdayaan sosial bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem. Sejak implementasinya pada Juli 2025 di 63 lokasi di seluruh Indonesia, Sekolah Rakyat diharapkan menjadi model pendidikan alternatif bagi kelompok miskin ekstrem (PAN RB, 2025).

Namun, implementasi program Sekolah Rakyat belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Berdasarkan teori implementasi kebijakan George Edward III, keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat faktor utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi (Edward, 1980). Dalam konteks Sekolah Rakyat, beberapa permasalahan muncul pada tahap implementasi, antara lain kurangnya sosialisasi program di masyarakat, rendahnya transparansi dalam pengelolaan insentif guru, hingga persoalan koordinasi lintas kementerian. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan antara perencanaan dan pelaksanaan kebijakan di tingkat lapangan. Kondisi ini sesuai dengan pandangan Edward III bahwa ketidakjelasan, distorsi, atau inkonsistensi komunikasi dapat menimbulkan ketidaksinkronan pelaksanaan kebijakan di tingkat lokal. Bahkan, Sekolah Rakyat berpotensi menimbulkan stigma terhadap anak-anak dari keluarga miskin sebagai kelompok terpinggirkan (Janzen, 2023).

Selain itu, tantangan juga muncul dari aspek sumber daya manusia. Hanya dalam satu bulan sejak pelaksanaan, lebih dari 140 guru dilaporkan mengundurkan diri akibat ketidakjelasan insentif, transparansi penempatan kerja, dan belum adanya jaminan kesejahteraan bagi tenaga pendidik (Aurel & Naomi, 2025). Sejalan dengan temuan (Ashidiqie et al., 2023) bahwa kesejahteraan guru sangat menentukan profesionalitas guru. Minimnya tenaga pengajar tentu berdampak langsung terhadap kualitas pembelajaran dan efektivitas implementasi kebijakan di lapangan. Lebih jauh, kompleksitas implementasi program ini juga disebabkan oleh model kolaborasi antarinstansi. Selain Kementerian Sosial, program Sekolah Rakyat turut melibatkan Kementerian Pendidikan, Kementerian Agama, Kementerian PAN-RB, TNI, dan pemerintah daerah. Meskipun pendekatan *collaborative governance* ini diharapkan memperkuat efektivitas pelaksanaan, fragmentasi kewenangan dan potensi tumpang tindih justru menjadi sumber inefisiensi dan birokratisasi baru. Keterlibatan unsur militer, dinilai berpotensi menciptakan lingkungan belajar yang represif dan kurang kondusif bagi pengembangan karakter murid (Aurel et al., 2025). Hal ini memperkuat pandangan Edward III bahwa implementasi berpotensi gagal ketika pelaksana tidak memiliki sumber daya informasi, staf, wewenang, maupun fasilitas yang memadai khususnya fasilitas penunjang pendidikan. Begitupun dengan struktur birokrasi yang rumit, juga akan mempengaruhi jalannya implementasi Sekolah Rakyat.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan program Sekolah Rakyat dengan menggunakan kerangka teori (Edward, 1980) pada kasus Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA) 10 Jakarta Selatan. Penelitian ini penting dilakukan dikarenakan implementasi kebijakan pendidikan sering kali menghadapi kendala pada tahap pelaksanaan, seperti keterbatasan sumber daya, koordinasi antarpelaksana, dan persepsi pelaksana kebijakan yang belum seragam. Oleh karena itu, analisis terhadap dimensi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi sebagaimana dikemukakan oleh George Edward III menjadi sangat relevan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas program tersebut (Edward, 1980). Program Sekolah Rakyat merupakan intervensi pendidikan yang baru dilaksanakan, belum ada kajian artikel tentang Sekolah Rakyat, terlebih lagi pembahasan penelitian ini berfokus pada implementasi Sekolah Rakyat dengan menggunakan kerangka George Edward III, kerangka ini sangat relevan untuk menilai efektivitas pelaksanaan kebijakan baru melalui empat dimensi komunikasi,

sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis empiris pertama mengenai implementasi Sekolah Rakyat menggunakan kerangka George Edward III.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan *post-positivism*, yang mengoperasionalkan konsep utama implementasi kebijakan dari George Edward III (Edward, 1980). Menurut (Creswell, 2018) penelitian kualitatif merupakan metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang diberikan oleh sejumlah atau sekelompok orang terhadap masalah sosial atau kemanusiaan. Penelitian dilakukan di Sekolah Rakyat Menengah Atas 10 Jakarta Selatan yang menjadi salah satu *pilot project* dari program Sekolah Rakyat. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Narasumber yang diwawancarai dalam penelitian ini berasal dari Sekolah Rakyat Menengah Atas 10 Jakarta Selatan dan Kementerian Sosial yang didalamnya mencakup Kepala Sekolah, Guru, Siswa, Tenaga Administrasi SRMA 10 Jakarta Selatan, dan Tenaga Teknis Menteri (TTM) Bidang Pelaksana Evaluasi Program Prioritas. Data sekunder diperoleh melalui analisis dokumen kebijakan, peraturan, dan dokumen resmi lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan Sekolah Rakyat.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis *ideal type* Max Weber. Menurut (Neuman, 2014), teknik *ideal type* Max Weber dilakukan dengan membandingkan data, informasi, dan fakta dengan kondisi ideal yang digaungkan oleh teori implementasi kebijakan serta aturan yang ada. Alasan penelitian ini menggunakan *ideal type* Max Weber dikarenakan penelitian ini menggunakan konsep teori implementasi kebijakan untuk membandingkan dengan data atau informasi yang diperoleh dalam tahapan pengumpulan data baik melalui wawancara mendalam maupun dari studi pustaka. Teori konsep implementasi kebijakan digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian ini. Setelah dilakukan analisis data, selanjutnya peneliti melakukan penarikan kesimpulan dan memberikan saran. Penarikan kesimpulan dilakukan untuk menjawab pertanyaan penelitian tentang implementasi kebijakan Sekolah Rakyat di SRMA 10 Jakarta Selatan.

3. Hasil

3.1. Gambaran Umum Sekolah Rakyat

Sekolah Rakyat adalah satuan pendidikan berbasis asrama dan pendidikan karakter yang menyelenggarakan pendidikan formal pada jenjang pendidikan dasar dan/atau pendidikan menengah yang terintegrasi bagi peserta didik yang berasal dari keluarga miskin ekstrem, miskin, dan/atau rentan. Sasaran dari Sekolah Rakyat adalah keluarga miskin ekstrem dan miskin yang tergolong dari kelompok desil 1 dan desil 2. Sekolah Rakyat memiliki fasilitas yang cukup banyak, diantaranya: ruang kelas, asrama laki-laki dan perempuan, ruang guru dan ruang kepala sekolah, ruang makan dan dapur terpadu, sarana olahraga, ruang ibadah dan aula, unit kesehatan sekolah dan ruang konseling, serta ruang komputer dan laboratorium. Sekolah Rakyat tidak hanya bersifat reaktif terhadap permasalahan ketimpangan, tetapi juga proaktif dalam membangun sistem pendidikan alternatif yang holistik, adaptif, dan berkelanjutan (Rizqillah & Ulum, 2025).

Dalam Sekolah Rakyat kurikulum yang digunakan tidak hanya berfokus pada aspek akademik saja, namun juga terdapat kesiapan fisik, dan mental yang tergabung dalam *talent mapping*. Disamping itu juga terdapat program asrama yang didalamnya mencakup, diantaranya: penguatan karakter, penguatan spiritualitas, penguatan cinta tanah air, dan penguatan bahasa. Jenis kegiatan program akademik juga sudah mengikuti standar kurikulum nasional, diantaranya: intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler (Halimah et al., 2025). Pendekatan holistik tersebut menunjukkan bahwa Sekolah Rakyat tidak hanya berorientasi pada hasil belajar kognitif, tetapi juga pada pembentukan karakter dan pengembangan potensi diri peserta didik secara menyeluruh.

3.2. Implementasi Kebijakan

Menurut Edward III, 1980 dalam implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat faktor utama yang secara simultan saling mempengaruhi dan berinteraksi antar satu faktor dengan faktor lainnya, faktor-faktor tersebut pada akhirnya akan mempengaruhi baik itu membantu keberhasilan implementasi kebijakan atau justru menghambat implementasi kebijakan. Faktor Komunikasi, Edward III berpandangan bahwa komunikasi dapat menimbulkan implementasi kebijakan tidak konsisten serta berdampak pada kegagalan implementasi kebijakan. Indikator yang diangkat dalam faktor komunikasi diantaranya: transmisi, kejelasan, dan konsistensi. Faktor Sumber Daya, Edwards III berpandangan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan salah satu poin krusialnya berasal dari kapabilitas sumber daya yang dimiliki. Suatu kebijakan kemungkinan besar akan gagal ketika pelaksana kebijakan tidak memiliki sumber daya yang cukup, sehingga menghasilkan kebijakan yang tidak efektif. Adapun indikator yang diangkat dalam faktor sumber daya diantaranya: staf, informasi, wewenang, dan fasilitas.

Pada dimensi disposisi pelaksana kebijakan, Edward III beranggapan bahwa para pelaksana kebijakan mempunyai kekuasaan yang besar dalam melaksanakan atau mengimplementasikan kebijakan. Komunikasi-komunikasi dari pengambil kebijakan dan aktor lain sering kali tidak jelas dan tidak konsisten, hal ini menimbulkan kebijakan masuk ke dalam “zona ketidakacuhan” yang mengarahkan kebijakan untuk mengesampingkan sisi substantif dan lebih condong mengarah ke kepentingan pribadi atau kelompoknya (Mubarak et al., 2020). Pada dimensi struktur birokrasi, Edwards III berpandangan bahwa birokrasi merupakan salah satu badan yang paling sering bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana kebijakan. Birokrasi baik secara sadar atau tidak sadar memilih bentuk-bentuk organisasi untuk kesepakatan kolektif, dalam rangka memecahkan masalah-masalah sosial dalam kehidupan *modern*. Mereka tidak hanya berada dalam struktur pemerintah, tetapi juga berada dalam organisasi-organisasi swasta yang lain bahkan di institusi-institusi pendidikan dan kadangkala suatu sistem birokrasi sengaja diciptakan untuk menjalankan suatu kebijakan tertentu.

3.2.1. Komunikasi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses komunikasi dalam implementasi Program Sekolah Rakyat di Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA) 10 Jakarta Selatan berlangsung melalui dua pola utama, yakni komunikasi vertikal dan horizontal. Dimensi komunikasi menjadi jalur utama dalam penyampaian informasi, koordinasi tindakan, dan memastikan pemahaman (Ibad & Megawati, 2024). Komunikasi vertikal dilakukan secara berjenjang dari pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial hingga ke unit pelaksana di lapangan. Kepala Sekolah SRMA 10 menjelaskan bahwa proses penyampaian kebijakan ini didukung oleh dokumen resmi seperti Instruksi presiden, surat edaran, serta petunjuk teknis yang mengatur pelaksanaan program. Meskipun demikian, masih ditemukan beberapa perbedaan interpretasi terhadap petunjuk pelaksanaan di antara aktor pelaksana, khususnya terkait kewenangan dan batas tanggung jawab masing-masing lembaga.

Selain komunikasi vertikal, mekanisme komunikasi horizontal antarinstansi pemerintah juga berperan penting dalam mendukung implementasi kebijakan. Koordinasi dilakukan antara Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian PUPR, Kementerian Koordinator PMK, dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Namun, hasil penelitian menunjukkan adanya ketidaksinkronan informasi di antara lembaga-lembaga tersebut, terutama dalam penetapan pembagian tanggung jawab atas urusan kepegawaian, sarana prasarana, dan kesiswaan. Kepala sekolah menegaskan bahwa ketika muncul masalah teknis, pelaksana lapangan sering kali kesulitan menentukan instansi yang harus dihubungi untuk memperoleh keputusan yang pasti.

Kendala komunikasi juga terjadi di tingkat operasional sekolah. Beberapa guru mengemukakan bahwa sering terjadi perubahan mendadak terhadap jadwal kegiatan sekolah tanpa adanya

pemberitahuan resmi atau tertulis. Misalnya, kegiatan kokurikuler yang semula dijadwalkan pada bulan November tahun 2025 dipercepat ke bulan Oktober tahun 2025 tanpa penjelasan yang memadai. Perubahan semacam ini menimbulkan kebingungan di antara guru dan siswa serta memengaruhi efektivitas kegiatan pembelajaran. Secara umum, walaupun komunikasi antarpemangku kebijakan telah terbentuk, kualitas transmisi informasi dan konsistensi penyampaian pesan masih perlu diperkuat agar pelaksanaan program berjalan lebih efektif.

3.2.2. *Sumber Daya*

Dari sisi sumber daya manusia (SDM), hasil penelitian menunjukkan bahwa SRMA 10 Jakarta Selatan memiliki jumlah tenaga pendidik dan kependidikan yang mendekati komposisi ideal. Terdapat 17 guru akademik, 4 wali asuh, 10 wali asrama, dan 3 tenaga administrasi yang bertanggung jawab terhadap 100 siswa yang terdaftar. Meski demikian, masih terdapat kekurangan satu guru agama Katolik dan dua tenaga administrasi tambahan. Kepala Sekolah menilai bahwa kekurangan ini berdampak pada peningkatan beban kerja administratif yang cukup tinggi, terutama dalam proses pelaporan dan pengelolaan data siswa. Tenaga administrasi di sekolah ini juga harus menangani urusan keuangan, kepegawaian, dan logistik, sehingga efisiensi kerja menjadi tidak optimal (Mutaqin & Rahman, 2025).

Pada aspek keuangan, SRMA 10 belum memiliki otoritas anggaran mandiri karena belum berstatus sebagai Satuan Kerja (Satker), pembentukan Satker otonom bagi Sekolah Rakyat menjadi hal yang penting agar sekolah memiliki otoritas anggaran mandiri, fleksibilitas pengelolaan sumber daya, dan kapasitas respons yang lebih cepat terhadap kebutuhan pendidikan Sekolah Rakyat berbasis asrama. Proses pengajuan dana operasional dan kebutuhan fasilitas masih melalui Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) Kementerian Sosial. Kondisi ini menyebabkan keterlambatan dalam pemenuhan kebutuhan rutin dan membatasi fleksibilitas sekolah dalam mengelola sumber daya. Selain itu, para guru hanya menerima gaji pokok tanpa tunjangan kinerja (tukin), dan belum ada regulasi jelas terkait Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) maupun pelaksanaan Program Pendidikan Profesi Guru (PPG).

Dari aspek fasilitas, sebagian besar sarana dasar seperti ruang kelas, asrama, ruang makan, dan sarana olahraga telah tersedia dengan kondisi memadai. Namun, masih terdapat kekurangan fasilitas penunjang pembelajaran seperti laboratorium, buku paket, dan perangkat komputer siswa. Keterbatasan tersebut menyebabkan proses belajar mengajar menjadi kurang interaktif dan inovatif (Kisnawati & Riswanda, 2024). Siswa menyatakan bahwa ketiadaan buku paket membuat mereka hanya mencatat ringkasan dari materi yang disampaikan guru, sementara ketiadaan perangkat digital membatasi akses mereka terhadap sumber informasi terkini. Meski demikian, pihak Kementerian Sosial telah merencanakan pemenuhan fasilitas tersebut secara bertahap hingga akhir tahun 2025.

3.2.3. *Disposisi Pelaksana*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa disposisi pelaksana Program Sekolah Rakyat di SRMA 10 Jakarta Selatan tergolong baik. Para guru dan tenaga kependidikan memiliki pemahaman yang cukup mendalam mengenai tujuan dan mekanisme pelaksanaan program. Mayoritas guru sebelumnya mengajar di sekolah reguler, sehingga mereka memiliki dasar pengalaman yang kuat. Kementerian Sosial juga memberikan pelatihan intensif selama dua minggu bagi kepala sekolah, guru, wali asuh, dan wali asrama sebelum program dimulai. Pelatihan ini membekali mereka dengan kompetensi dasar dalam manajemen pendidikan berbasis asrama dan pembentukan karakter peserta didik.

Selain pemahaman, tingkat komitmen dan motivasi pelaksana juga tinggi. Kepala sekolah menekankan bahwa seluruh tenaga pendidik dan pengasuh memiliki semangat pengabdian yang kuat terhadap program ini. Mereka tidak hanya berperan sebagai pengajar di dalam kelas, tetapi juga bertanggung jawab terhadap pembinaan siswa di luar jam pelajaran. Beberapa guru menyatakan bahwa sistem asrama bukan beban tambahan, melainkan tantangan profesional untuk mendidik siswa dari latar belakang ekonomi rendah menjadi individu yang mandiri dan berkarakter. Namun, beban kerja yang tinggi dan keterbatasan waktu pribadi berpotensi memunculkan kelelahan kerja (*burnout*) jika tidak diimbangi dengan dukungan kesejahteraan yang memadai.

Dalam menghadapi perbedaan latar belakang sosial siswa, pihak sekolah menerapkan sistem pembinaan berbasis karakter melalui mekanisme poin pelanggaran dan poin kebaikan. Sistem ini digunakan untuk mendisiplinkan siswa dengan pendekatan edukatif, bukan hukuman. Pelanggaran seperti tidak masuk sekolah, merokok, atau berkelahi diberi poin negatif yang dapat dikompensasi melalui perilaku positif. Kepala sekolah menilai bahwa sistem ini efektif dalam menumbuhkan tanggung jawab dan kesadaran moral siswa. Secara umum, disposisi pelaksana yang kuat menjadi faktor pendorong utama keberhasilan implementasi kebijakan di lapangan (Septiani, 2024).

3.2.4. Struktur Birokrasi

Pada dimensi struktur birokrasi, hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Program Sekolah Rakyat di SRMA 10 telah berpedoman pada Permensos Nomor 7 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Rakyat. Namun, Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ada masih bersifat umum sehingga sulit diterapkan secara kontekstual. Oleh karena itu, pihak sekolah melakukan penyesuaian dengan merumuskan tata tertib tambahan yang lebih spesifik terhadap kebutuhan di sekolah. Upaya ini mencerminkan fleksibilitas pelaksana, tetapi juga menandakan belum adanya keseragaman pedoman teknis antarsekolah.

Koordinasi birokrasi, terutama dalam hal kepegawaian, masih menghadapi kendala yang rumit. Kepala sekolah direkrut oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, tetapi tanggung jawab administratifnya berada di bawah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kondisi ini menimbulkan ambiguitas dalam hal penerbitan Surat Keputusan (SK), penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), dan pemberian sertifikasi maupun tunjangan. Selain itu, data kepegawaian antara Badan Kepegawaian Nasional (BKN) dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) belum sinkron, sehingga menyulitkan proses administrasi kepegawaian.

Dari sisi pengawasan, sistem evaluasi pelaksanaan program belum terintegrasi secara formal. Kementerian Sosial memang telah menetapkan mekanisme pemantauan dan pelaporan dalam Permensos No. 7 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Rakyat, tetapi belum ada petunjuk teknis yang mengatur pelaksanaannya di lapangan. Di SRMA 10, evaluasi dilakukan melalui *case conference* bulanan yang dihadiri seluruh SDM sekolah untuk membahas kendala yang muncul. Namun, forum ini masih bersifat observatif dan belum berbasis indikator kinerja yang terukur. Akibatnya, efektivitas pengawasan sulit diukur secara objektif. Proses evaluasi dan monitoring, sistem pendidikan menjadi unsur penting dalam mengelola program pendidikan khususnya Sekolah Rakyat, terlebih program ini sudah berjalan 6 bulan terakhir (Rosmalina & Elfrianto, 2024).

4. Pembahasan

Analisis implementasi kebijakan program Sekolah Rakyat studi kasus di Sekolah Rakyat Menengah Atas 10 Jakarta Selatan dilakukan dengan metode implementasi kebijakan George Edward III. Dalam teori implementasi (Edward, 1980) terdapat empat faktor penyebab kegagalan atau keberhasilan dari suatu implementasi kebijakan atau program, diantaranya: (1) komunikasi, (2) sumber daya, (3) disposisi pelaksana, dan (4) struktur birokrasi, yang didalamnya memiliki indikator-indikator tersendiri yang disesuaikan dengan topik Sekolah Rakyat.

4.1. Komunikasi

Analisis terhadap dimensi komunikasi menunjukkan bahwa efektivitas komunikasi masih menjadi tantangan utama dalam implementasi kebijakan lintas sektoral seperti Sekolah Rakyat. Walaupun jalur komunikasi vertikal telah terbentuk, masih terjadi distorsi makna dan perbedaan interpretasi terhadap pesan kebijakan di tingkat pelaksana. Hal ini sejalan dengan teori Edward III yang menekankan bahwa transmisi, kejelasan, dan konsistensi pesan menjadi prasyarat keberhasilan implementasi. Komunikasi horizontal yang melibatkan banyak kementerian juga memperlihatkan kompleksitas koordinasi yang tinggi, sehingga diperlukan mekanisme komunikasi yang lebih terintegrasi dan berbasis pada protokol kerja antarinstansi.

Selain aspek struktur, komunikasi internal di tingkat sekolah juga perlu diperbaiki. Perubahan mendadak terhadap jadwal kegiatan menunjukkan lemahnya mekanisme penyampaian informasi antarunit di sekolah. Situasi ini menggambarkan kurangnya koordinasi dan komunikasi yang baku di lingkungan Sekolah Rakyat. Untuk memperbaikinya, sekolah perlu menetapkan standar komunikasi formal, baik melalui *platform* digital internal maupun prosedur administratif yang memastikan setiap informasi tersampaikan secara cepat dan seragam.

Dengan memperkuat sistem komunikasi dua arah antara pemerintah pusat dan para pelaksana di lapangan, serta antarunit internal, implementasi kebijakan Sekolah Rakyat dapat berjalan lebih konsisten dan terarah. Koordinasi lintas sektor juga perlu diarahkan pada penguatan *collaborative governance*, yaitu model tata kelola yang menekankan kesetaraan, kejelasan peran, dan tanggung jawab bersama antarinstansi yang terlibat. Pendekatan ini penting untuk memastikan bahwa setiap aktor kebijakan memiliki persepsi dan komitmen yang sama terhadap tujuan program. Dengan demikian, risiko distorsi kebijakan, tumpang tindih kewenangan, dan konflik peran dapat diminimalisasi sehingga pelaksanaan Sekolah Rakyat menjadi lebih efektif dan berkelanjutan. Sebagai rekomendasi strategis, diperlukan penyusunan *Standard Operating Procedure* (SOP) komunikasi lintas sektor yang bersifat baku, rinci, dan mudah dioperasikan. Dengan adanya SOP komunikasi yang terstandarisasi dan mengikat seluruh pemangku kepentingan, efektivitas transmisi informasi dapat ditingkatkan, distorsi pesan dapat diminimalkan, dan koordinasi lintas sektor dapat berlangsung lebih efisien.

4.2. Sumber Daya

Analisis terhadap dimensi sumber daya menunjukkan bahwa keterbatasan anggaran dan fasilitas masih menjadi hambatan utama dalam pelaksanaan kebijakan. Walaupun secara kuantitatif tenaga pendidik cukup memadai, ketiadaan Satker mandiri membuat pengelolaan keuangan menjadi tidak efisien. Edward III menegaskan bahwa ketersediaan sumber daya manusia, informasi, wewenang, dan fasilitas merupakan faktor penentu keberhasilan implementasi. Dalam konteks Sekolah Rakyat, sumber daya yang ada belum mampu mendukung seluruh kebutuhan operasional sekolah secara optimal.

Disisi lain, para guru hanya menerima gaji pokok tanpa tunjangan kinerja (tukin), dan belum ada regulasi jelas terkait Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) maupun pelaksanaan Program Pendidikan Profesi Guru (PPG). Ketidakjelasan skema insentif dan terbatasnya pengembangan profesional ini tidak hanya menurunkan motivasi, tetapi juga berpotensi meningkatkan risiko burnout (kelelahan kerja). Hal ini disebabkan oleh beban kerja guru yang jauh lebih tinggi dibandingkan sekolah reguler, karena harus menjalankan fungsi pengajaran sekaligus pembinaan asrama, namun tidak diimbangi dengan dukungan kesejahteraan dan pengembangan kompetensi yang memadai.

Kekurangan laboratorium dan perangkat digital menunjukkan kesenjangan antara kebutuhan pendidikan modern dan realitas di lapangan. Hal ini berdampak langsung pada kualitas proses pembelajaran yang masih konvensional dan terbatas pada metode ceramah. Ketidakjelasan sistem insentif juga mengindikasikan lemahnya mekanisme penghargaan terhadap pelaksana kebijakan. Jika dibiarkan, kondisi ini dapat mengurangi motivasi guru dan menurunkan kualitas hasil belajar siswa. Untuk itu, diperlukan kebijakan yang menekankan efisiensi alokasi sumber daya melalui desentralisasi penganggaran dan pembentukan Satker Sekolah Rakyat yang otonom. Selain itu, penyediaan fasilitas pembelajaran digital menjadi investasi strategis dalam meningkatkan kualitas pendidikan berasrama. Dengan demikian, dimensi sumber daya dapat mendukung efektivitas kebijakan berkelanjutan.

4.3. Disposisi Pelaksana

Analisis menunjukkan bahwa disposisi pelaksana merupakan kekuatan utama yang menopang keberhasilan implementasi kebijakan Sekolah Rakyat. Motivasi, dedikasi, dan rasa tanggung jawab yang tinggi menjadi faktor pendorong utama keberhasilan program di lapangan. Hal ini memperlihatkan bahwa faktor manusia memegang peran strategis dalam menjembatani antara

rancangan kebijakan dan realitas pelaksanaannya di lapangan. Temuan ini sesuai dengan pandangan Edward III yang menegaskan bahwa sikap dan komitmen pelaksana merupakan determinan penting dalam implementasi kebijakan.

Namun, motivasi pelaksana yang tinggi berpotensi menurun apabila tidak diimbangi dengan sistem insentif dan dukungan kesejahteraan yang proporsional. Beban kerja tinggi dalam sistem pendidikan berbasis asrama memerlukan kompensasi yang sesuai agar semangat kerja dapat dipertahankan. Dalam konteks pembinaan siswa, penerapan sistem poin pelanggaran dan kebaikan merupakan bentuk *restorative approach* yang efektif dalam membangun karakter siswa dari latar belakang marginal. Pemerintah perlu memastikan keberlanjutan motivasi pelaksana melalui kebijakan yang berfokus pada pengembangan profesional guru dan pengasuh. Program pelatihan berkelanjutan serta skema penghargaan berbasis kinerja dapat meningkatkan kapasitas mereka dalam menghadapi dinamika sosial dan psikologis siswa dari kelompok miskin ekstrem.

Kekuatan disposisi pelaksana ini secara empiris juga berfungsi sebagai kompensator atas berbagai kelemahan yang ditemukan pada dimensi sumber daya dan struktur birokrasi. Ketidakjelasan skema insentif, keterbatasan fasilitas pembelajaran, hingga kompleksitas koordinasi lintas kementerian tidak serta merta menghambat proses implementasi karena ditopang oleh komitmen tinggi, dan motivasi para pelaksana. Dengan demikian, tingginya dedikasi guru, wali asuh, dan seluruh sumber daya di lapangan menjadi faktor penentu yang menjaga stabilitas jalannya Sekolah Rakyat pada tahap awal pelaksanaan, sekaligus menunjukkan bahwa kualitas pelaksana dapat menjadi penyangga kritis dalam konteks implementasi kebijakan yang menghadapi berbagai keterbatasan.

4.4. Struktur Birokrasi

Dari perspektif teoritis, struktur birokrasi yang kompleks sering kali menjadi faktor penghambat utama dalam efektivitas implementasi kebijakan publik. Dalam konteks Sekolah Rakyat, tumpang tindih kewenangan antara Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Sosial, serta Pemerintah Daerah menimbulkan ambiguitas dalam pengelolaan kepegawaian, anggaran, dan tanggung jawab administratif. Kondisi ini menyebabkan proses pengambilan keputusan menjadi lambat dan kurang responsif terhadap kebutuhan di lapangan. Hal tersebut sejalan dengan pandangan Edward III bahwa semakin banyak tingkatan dalam struktur birokrasi, semakin besar risiko terjadinya inefisiensi, keterlambatan pengambilan keputusan, serta distorsi kebijakan di tingkat implementasi. Fragmentasi kewenangan antarinstitusi ini tidak hanya menciptakan ketidakpastian prosedural bagi pelaksana, tetapi juga memperpanjang waktu respons atas kebutuhan operasional sekolah. Oleh karena itu, diperlukan reformasi struktur yang diarahkan pada integrasi sistem data kepegawaian antara Kemendikbud, Kemensos, BKN, BKD, dan instansi lain yang terlibat.

Selain itu, belum adanya sistem evaluasi dan pengawasan yang terukur menunjukkan lemahnya mekanisme *performance monitoring*. Evaluasi yang dilakukan secara kualitatif melalui *case conference* bulanan memang berguna untuk identifikasi masalah, tetapi tidak cukup untuk menilai kinerja secara objektif. Diperlukan indikator evaluasi yang kuantitatif dan berbasis hasil (*result-based evaluation*) agar kebijakan dapat dievaluasi secara berkelanjutan. Oleh karena itu, reformulasi struktur birokrasi menjadi langkah penting. Pembentukan Satuan Kerja Sekolah Rakyat yang mandiri, penyusunan petunjuk teknis evaluasi, dan integrasi data kepegawaian antarinstitusi dapat meningkatkan efisiensi koordinasi serta akuntabilitas program. Dengan birokrasi yang lebih ringkas dan sistem evaluasi yang kuat, efektivitas implementasi kebijakan akan lebih terjamin.

5. Kesimpulan

Implementasi kebijakan Program Sekolah Rakyat di Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA) 10 Jakarta Selatan menunjukkan arah pelaksanaan yang positif. Berdasarkan analisis teori George Edward III, keberhasilan implementasi banyak ditopang oleh dua dimensi utama, yaitu komunikasi dan disposisi pelaksana. Proses komunikasi vertikal dan horizontal telah berjalan relatif baik dalam menyampaikan kebijakan dari pemerintah pusat hingga pelaksana di lapangan, kendati masih terdapat beberapa kendala dalam konsistensi dan sinkronisasi informasi antarinstitusi, oleh karenanya

dibutuhkan konsistensi lebih. Disposisi pelaksana yang ditunjukkan oleh guru, kepala sekolah, dan tenaga kependidikan juga relatif terlaksana dengan baik dan menjadi kekuatan utama yang menjaga keberlanjutan program. Komitmen dan dedikasi tinggi para pelaksana, disertai penerapan sistem pembinaan karakter yang humanis, menjadikan Sekolah Rakyat mampu menjalankan fungsi sosial dan pendidikan secara seimbang di tengah keterbatasan sumber daya.

Namun demikian, hasil penelitian juga menegaskan bahwa dimensi sumber daya dan struktur birokrasi masih menjadi tantangan utama yang perlu segera diatasi untuk meningkatkan efektivitas implementasi. Kekurangan tenaga pendidik, ketidakjelasan insentif dan kesejahteraan guru, serta keterbatasan fasilitas pembelajaran digital dan laboratorium berdampak langsung pada kualitas proses belajar mengajar. Sementara itu, kompleksitas koordinasi lintas kementerian dan belum tersedianya sistem evaluasi dan pengawasan yang terintegrasi menunjukkan bahwa tata kelola kebijakan masih bersifat administratif dan belum sepenuhnya berbasis kinerja. Oleh karena itu, keberhasilan jangka panjang program Sekolah Rakyat memerlukan penguatan struktur kelembagaan, penyediaan sumber daya yang memadai, serta reformasi birokrasi yang menekankan koordinasi lintas sektor dan mekanisme evaluasi berbasis hasil. Dengan langkah-langkah tersebut, Sekolah Rakyat berpotensi menjadi model pendidikan inklusif yang berkelanjutan dalam memutus rantai kemiskinan antargenerasi di Indonesia.

6. Saran

Berdasarkan temuan penelitian, terdapat sejumlah langkah strategis yang perlu dilakukan oleh Kementerian Sosial dan instansi lain yang terlibat dalam Sekolah Rakyat untuk meningkatkan efektivitas implementasi Program Sekolah Rakyat, khususnya di SRMA 10 Jakarta Selatan, diantaranya: (1) pembentukan Satker otonom untuk memberikan kewenangan anggaran yang memadai kepada sekolah, sehingga proses pemenuhan kebutuhan operasional tidak lagi bergantung pada alur birokrasi yang rumit, (2) penerapan sistem insentif tunjangan kinerja (tukin), dan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), dan penyelarasan Program Pendidikan Profesi Guru (PPG). Konsistensi kebijakan kesejahteraan ini diperlukan untuk menghindari risiko *burnout* serta menjaga komitmen dan motivasi pelaksana sebagai kekuatan utama implementasi, (3) Penyusunan *Standard Operating Procedure* (SOP) kepegawaian terpadu lintas instansi dan integrasi data BKN/BKD untuk memperkuat transparansi, akurasi, dan efisiensi administrasi kepegawaian Sekolah Rakyat, dan (4) Pengembangan sistem pengawasan dan evaluasi berbasis indikator kinerja yang terukur (*result-based evaluation*). Dengan demikian, monitoring tidak hanya bersifat observatif, tetapi menjadi instrumen akuntabilitas yang objektif untuk menilai capaian program dan perbaikan kebijakan secara berkelanjutan.

Ucapan terimakasih: Terimakasih kepada Kementerian Sosial RI, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, serta kepada jajaran SDM dan siswa dari Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA) 10 Jakarta Selatan yang telah memberikan dukungan pada penulisan karya ilmiah ini.

Daftar Pustaka

- Ainscow, M. (2020). Promoting inclusion and equity in education: lessons from international experiences. *Nordic Journal of Studies in Educational Policy*, 6(1), 7–16. <https://doi.org/10.1080/20020317.2020.1729587>
- Ashidiqie, H., Hakim, A., & Suklani, S. (2023). MANAJEMEN GURU PADA OTONOMI DAERAH (DESENTRALISASI). *Tanzhimuna*, 3(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.54213/tanzhimuna.v3i02.376>
- Aurel, S., & Naomi, N. (2025, September 8). *Evaluasi Sekolah Rakyat: Catatan Kritis, Harapan, dan Tantangan*. KBR. <https://kbr.id/articles/ragam/sekolah-rakyat-dimulai-pro-kontra-dituai>
- Aurel, S., Ridwansyah, A., Sindu, S., Antari, A., & Haetami, H. (2025, July 14). *Sekolah Rakyat Dimulai, Pro Kontra Dituai*. KBR. <https://kbr.id/articles/ragam/sekolah-rakyat-dimulai-pro-kontra-dituai>
- BPS. (2024a, December 1). *Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Provinsi dan Jenjang Pendidikan*. Badan Pusat Statistik. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MzAzIzI=/angka-partisipasi-kasar--apk--menurut-provinsi-dan-jenjang-pendidikan.html>

- BPS. (2024b, December 2). *Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Provinsi dan Jenjang Pendidikan*. Badan Pusat Statistik. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MzA0IzI=/angka-partisipasi-murni--apm--menurut-provinsi-dan-jenjang-pendidikan.html>
- BPS. (2025, June 25). *Persentase Penduduk Miskin (P0) Menurut Provinsi dan Daerah (Persen)*, 2025. Badan Pusat Statistik. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTkyIzI=/persentase-penduduk-miskin--p0--menurut-provinsi-dan-daerah.html>
- Cremin, P., & Nakabugo, M. G. (2012). Education, development and poverty reduction: A literature critique. *International Journal of Educational Development*, 32(4), 499–506. <https://doi.org/10.1016/j.ijedudev.2012.02.015>
- Creswell, J. W. (2018). *Research Design Qualitatif, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (3rd ed). Sage Publication.
- Edward, G. (1980). *Implementing Public Policy* (2nd ed.). Congressional Quarterly Press.
- Faisal, F., Risal, A., Hardianto, H., & Elihami, E. (2020). NONFORMAL EDUCATION AND REDUCTION OF POVERTY IN RURAL AREAS. *Jurnal Edukasi Nonformal*. <https://doi.org/https://garuda.kemdiktisaintek.go.id/documents/detail/1500400>
- Fiszbein, A., & Schady, N. R. (2009). *Conditional Cash Transfers: Reducing Present and Future Poverty*. The World Bank. <https://doi.org/10.1596/978-0-8213-7352-1>
- Halimah, S., Wulandari, F., Nurbayah, S., Saidah, F., & Ulum, M. Z. (2025). Character Education Management Through Intracurricular, Co-curricular, and Extracurricular Activities in Schools. *Jurnal Inovatif Manajemen Pendidikan Islam*, 4(1), 101–112. <https://doi.org/10.38073/jimpi.v4i1.1958>
- Hikma, A., Ramadhani, S., & Amalia, N. (2020). PENGARUH PARTISIPASI PENDIDIKAN TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN DI PROVINSI JAWA TENGAH. *Ekonomi & Bisnis*, 18(1), 1–7. <https://doi.org/10.32722/eb.v18i1.3249>
- Hofmarcher, T. (2021). The effect of education on poverty: A European perspective. *Economics of Education Review*, 83, 102124. <https://doi.org/10.1016/j.econedurev.2021.102124>
- Ibad, D. A., & Megawati, S. (2024). PROGRAM KELUARGA BERENCANA: STUDI IMPLEMENTATIF TERHADAP PENDEKATAN KOMUNIKASI PUBLIK “EDWARD III” DI KOTA KEDIRI. *Publika*, 12(3). <https://doi.org/https://doi.org/10.26740/publika.v12n3.p871-878>
- Jannah, A. M., Setiyowati, A., & Lathif, K. H. (2021). MODEL LAYANAN PENDIDIKAN INKLUSIF DI INDONESIA. *ANWARUL: Jurnal Pendidikan Dan Dakwah.*, 1(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.58578/anwarul.v1i1.51>
- Janzen, M. D. (2023). Stigmatized: In/Forming identities of children in Care. *Power and Education*, 15(3), 274–290. <https://doi.org/10.1177/17577438221117770>
- Kementerian Sosial. (2025). *Apa itu Sekolah Rakyat? Sekolah Rakyat Kemensos*. <https://sekolahrakyat.kemensos.go.id/sekolah-rakyat>
- Kisnawati, D. G., & Riswanda, R. (2024). Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru melalui Jalur Zonasi di SMAN 1 Cikande. *Journal of Geopolitics and Public Policy*, 2(1). <https://doi.org/https://ejournal.yasin-alsys.org/anwarul/article/view/51>
- Mubarok, S., Zauhar, S., Setyowati, E., & Suryadi, S. (2020). Policy Implementation Analysis: Exploration of George Edward III, Marilee S Grindle, and Mazmanian and Sabatier Theories in the Policy Analysis Triangle Framework. *Journal of Public Administration Studies*, 005(01), 33–38. <https://doi.org/10.21776/ub.jpas.2020.005.01.7>
- Mutaqin, W., & Rahman, A. (2025). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM ZONASI PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA JENJANG SEKOLAH MENENGAH ATAS ATAU SEDERAJAT DI KABUPATEN PANDEGLANG. *AT-TAKLIM: Jurnal Pendidikan Multidisiplin.*, 2(10). <https://doi.org/https://doi.org/10.62383/risoma.v3i6.1273>
- Neuman, W. L. (2014). *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches* (7th ed). Pearson.
- PAN RB. (2025, July 14). *MPLS Sekolah Rakyat Resmi Dimulai Serentak di 63 Titik di Seluruh Indonesia*. PAN RB. https://www.setneg.go.id/baca/index/serentak_di_63_titik_di_seluruh_indonesia_mpls_sekolah_rakyat_resmi_dimulai
- Rizqillah, R., & Ulum, M. (2025). SEKOLAH RAKYAT SEBAGAI STRATEGI PENDIDIKAN INKLUSIF UNTUK PEMBERDAYAAN SDM MARGINAL DI INDONESIA: ANALISIS PROGRAM ERA PRESIDEN PRABOWO. *CAUSA: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 13(8). <https://doi.org/https://doi.org/10.6679/xve4jw22>
- Rosa, N. (2025, January 14). *Pemerintah Godok Konsep Sekolah Rakyat Mensos Mirip Boarding School*. DetikEdu. <https://www.detik.com/edu/sekolah/d-7731686/pemerintah-godok-konsep-sekolah-rakyat-mensos-mirip-boarding-school>

- Rosmalina, R., & Elfrianto, E. (2024). Evaluation And Monitoring as An Effort to Improve the Quality of Education. *Indonesian Journal Education*, 3(1), 8–15. <https://doi.org/10.56495/ije.v3i1.567>
- SDGs. (2015). *THE 17 GOALS*. SDGS UN.
- Septiani, E. (2024). Analisis Implementasi Kebijakan Kurikulum Merdeka Berdasarkan Teori Edward III di Tingkat Sekolah Dasar Kabupaten Luwu Utara. *ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 3(9), 287–294. <https://doi.org/10.56799/jim.v3i9.4781>
- World Bank. (2024, October 14). *PATHWAYS OUT OF THE POLYCRISIS*. World Bank Group. <https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/099101424092027337/p500855154ddde0b31827a1e9377c43d15e>



© 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/>).